

BARANG

PEKERJAAN
KONSTRUKSI

JASA
KONSULTANSI

JASA
LAINNYA

PENGADAAN BARANG DAN JASA B

**Gambaran umum proses pengadaan, prinsip,
kebijakan dan peraturan terkait pengadaan barang/jasa**



Oleh-Rifky.Aldila.P, ST., MT



UNITRI

Universitas Tribhuwana Tungadewi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

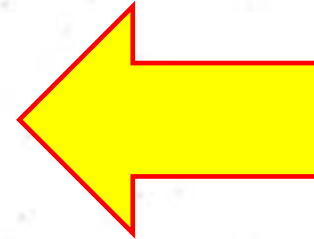
TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for*



KENAPA PERLU PENGADAAN BARANG DAN JASA??

“Karena adanya kebutuhan akan suatu barang dan jasa”



PENGERTIAN/ISTILAH

Pengadaan Barang/Jasa adalah

Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja

Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

Agan Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan meliputi

- a. Barang
- b. Pekerjaan Konstruksi
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya

Pengadaan Barang/Jasa dengan cara:

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia



TUJUAN Pengadaan Barang/Jasa

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
7. Mendorong pemerataan ekonomi; dan
8. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
- 2) Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa
- 4) Mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
- 5) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik
- 6) Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- 7) Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- 8) Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif dan
- 9) Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Efisien

Efektif

Transparan

Terbuka

Bersaing

Adil

Akuntabel



Siklus Tahapan dan Proses Pengadaan





TERIMA KASIH

QUESTION??

- 1. Apa saja prinsip prinsip pengadaan?**
- 2. Apa saja yang menjadi prinsip prinsip pengadaan barang dan atau jasa dalam suatu organisasi?**
- 3. Apa pentingnya penerapan prinsip pengadaan barang?**
- 4. Jelaskan apa yang dimaksud standardisasi nasional dalam pengadaan barang jasa dan apa tujuannya?**
- 5. Apakah dasar sama dengan prinsip?**